

LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)



2019

## **KATA PENGANTAR**

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasinya dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan adalah dengan menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam suatu dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP Tahun 2019 ini ditampilkan tugas pokok dan fungsi serta mandat yang dibebankan pada Dinas Pertanian dan Pangan. Selain itu juga berisi visi dan misi serta akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang memuat tentang analisis capaian kinerja dan analisis capaian keuangan.

Elemen kunci yang digunakan dalam pengukuran kinerja ini terdiri dari:

1. Perencanaan dan penetapan tujuan
2. Pengembangan ukuran yang relevan
3. Pelaporan formal atas hasil
4. Penggunaan informasi

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan menyempurnakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Tahun 2019 ini, kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Bukittinggi, Februari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN  
KOTA BUKITTINGGI**



**ISMAIL, SH. MM**

NIP.19620724 198302 1 001

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun setelah selesai melaksanakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam Laporan ini akan dijelaskan pencapaian Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi tahun 2019 atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2016 – 2021.

Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dengan Sasaran sebagai berikut: Sasaran 1 (satu) meningkatnya hasil pertanian dan perikanan dengan capaian indikator Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi sebesar 99.709,8.

Sasaran 2 (dua) Dinas Pertanian dan Pangan adalah Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan indikator kinerja persentase capaian Skor Pola Pangan Harapan. Pada tahun 2019 persentase capaian skor PPH adalah 97,54%.

Rincian hasil capaian indikator kinerja sasaran dan hambatan-hambatan/ permasalahan-permasalahan diungkapkan di dalam bab-bab LKIP ini.

Bukittinggi, Februari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN PANGAN  
KOTA BUKITTINGGI**



**ISMAIL, SH.MM**

NIP.19620724 198302 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1. Latar Belakang .....	1
I.2. Gambaran Umum Organisasi .....	2
I.3. Isu Strategis SKPD .....	7
I.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>10</b>
A. Rencana Strategis SKPD .....	10
B. Perjanjian Kinerja 2019 .....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>13</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
B. Realisasi Anggaran .....	20
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>26</b>
IV.1. Kesimpulan .....	26
IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja .....	26

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 .....	11
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi 2019 .....	12
Tabel 3. Klasifikasi Penilaian Capaian Kinerja Kegiatan.....	14
Tabel 4. Target dan capaian kinerja sasaran 1 .....	15
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 1 .....	17
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran 2 .....	19
Tabel 7. Rincian Aspek Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan .....	20
Tabel 8. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019 .....	21
Tabel 9. Rincian Aspek Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan bersumber APBN .....	24

**1.1. Latar Belakang**

Otonomi daerah adalah suatu isyarat bahwa semakin pentingnya pendekatan pembangunan dengan basis kinerja dibandingkan pendekatan pengembangan wilayah, pendekatan pembangunan dan pendekatan sektoral. Pembangunan berbasis kinerja memandang pentingnya keterpaduan intersektoral, interspasial, serta antar pelaku-pelaku pembangunan di dalam dan antar wilayah. Reformasi pembangunan yang mengarah kepada tuntutan transparansi, demokratisasi, partisipasi, otonomi daerah dan *good governance*, menuntut terjadinya perubahan dalam pengelolaan pembangunan nasional termasuk pembangunan agribisnis. Pembangunan pertanian ke depan diarahkan kepada peningkatan sebesar-besarnya peran dan partisipasi masyarakat. Pemerintah yang sebelumnya berperan sebagai perencana dan pelaksana harus berubah menjadi fasilitator, stimulator dan promotor pembangunan pertanian dan pelaksana pembangunan pertanian adalah masyarakat. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pertanian dilakukan oleh masyarakat. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pembangunan pertanian, perlu ditingkatkan upaya sinkronisasi dan koordinasi antara pelaku usaha pertanian baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan rencana strategik, rencana kinerja, dan pengukuran kinerja.

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah disampaikan kepada atasan masing-masing, serta kepada lembaga penilai/evaluasi

akuntabilitas kinerja, yang akhirnya kepada Presiden. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah sebagai media pertanggungjawaban dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya *good governance* dalam perspektif yang lebih luas.

## **1.2. Gambaran Umum Organisasi**

Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas maka Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Melaksanakan administrasi Dinas;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas**, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tanaman pangan, perkebunan, holtikultura, perikanan, peternakan, kesehatan hewan, penyuluhan, kelembagaan dan ketahanan pangan.
- 2. Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, dan

keuangan. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian dinas
- B. Sub Bagian Perencanaan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- C. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas menyelenggarakan program perencanaan dalam arti menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja, mengumpulkan, menghimpun, menginventarisasi data dari masing-masing bidang, sebagai bentuk program perencanaan dinas, dokumentasi kegiatan, koordinasi penyusunan program, penyajian data, informasi, sinkronisasi dan analisis data, menyiapkan perumusan program rencana kepegawaian, pembinaan pelaksanaan program, melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pembuatan laporan.

**3. Kepala Bidang Tanaman Pangan, dan Perkebunan dan Hortikultura** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan, perkebunan dan hortikultura. Kepala Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Hortikultura dibantu oleh:

- 1) Seksi tanaman pangan dan perkebunan, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan perkebunan.
- 2) Seksi hortikultura, mempunyai tugas melakukan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
- 3) Seksi lahan dan irigasi mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang pengolahan lahan dan irigasi.



**4. Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan**

melaksanakan tugas dibidang perikanan, peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat verteriner. Kepala Bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan dibantu oleh:

- 1) Seksi perikanan, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan memberikan bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang seksi perikanan.
- 2) Seksi peternakan, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang seksi peternakan.
- 3) Seksi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

**5. Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan,** Bidang penyuluhan dan kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, program pelaksanaan ketenagaan, metode, informasi penyuluhan, pupuk, pestisida, alat, mesin dan kelembagaan. Kepala Bidang Penyuluhan dan Kelembagaan dibantu oleh:

- 1) Seksi ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan, mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis serta memantau dan evaluasi di ketenagaan, metode dan informasi penyuluhan
- 2) Seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.
- 3) Seksi kelembagaan mempunyai tugas menyusun, malaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang kelembagaan pertanian, perikanan dan ketahanan pangan.

**6. Kepala Bidang ketahanan pangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis serta pemantauan atau evaluasi di bidang ketersediaan, kerawanan, distribusi, cadangan, konsumsi dan keamanan pangan. Kepala Bidang Ketahanan Pangan dibantu oleh:

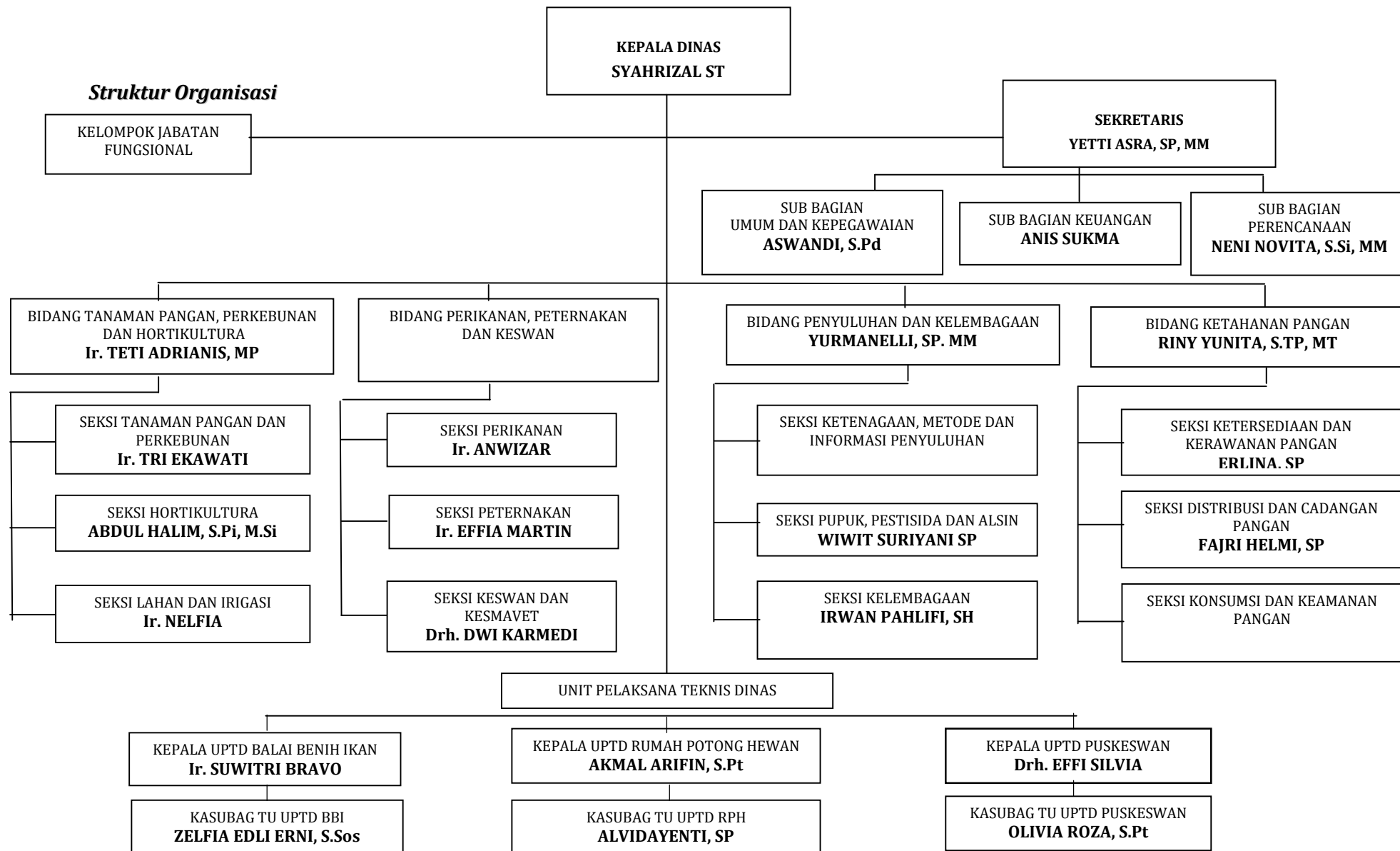
- 1) Seksi ketersediaan dan kerawanan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- 2) Seksi distribusi dan cadangan pangan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan.
- 3) Seksi konsumsi dan keamanan pangan mempunyai tugas menyusun, melaksanakan kebijakan, dan pembering bimbingan teknis, serta memantau dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

**7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD),** Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai 3 Unit pelaksana teknis Dinas dalam menyelenggarakan sebagian tugas Dinas di bidang pertanian, perikanan dan ketahanan pangan sesuai dengan kebutuhan.

- 1) UPTD Balai Benih Ikan
- 2) UPTD Rumah Potong Hewan
- 3) UPTD Puskeswan

**8. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional, dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan fungsional yang berbagai dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Setiap kelompok, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.

## Struktur Organisasi



### ***1.3. Isu Strategis SKPD***

Penyusunan LKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi tahun 2019 dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi dan sumber dana lainnya (APBD Provinsi Sumatera Barat, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah).

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra SKPD Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Terbatasnya sumberdaya lahan di Kota Bukittinggi dan kecenderungan terjadinya penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan;
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha pertanian yang sudah dibangun dan diserahkan kepada petani/keompok tani.
3. Belum optimalnya proses mekanisasi pertanian, kurang terjalinnya hubungan kerjasama dalam transfer inovasi teknologi baik dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi.
4. Lemahnya kelembagaan petani, sehingga kelompok tani-kelompok tani yang ada kurang dirasakan manfaatnya untuk kemajuan pertanian;
5. Banyaknya bahan pangan segar yang beredar dipasaran dengan dugaan berbahan pengawet, pestisida berbahaya dan penggunaan bahan tambahan pangan terlarang.
6. Belum optimalnya pengelolaan usaha tani ditingkat petani sehingga margin keuntungan yang diterima masih relatif kecil.
7. Rendahnya inovasi dibidang pengolahan produk hasil pertanian, sementara tingkat persaingan didalam pemasaran produk olahan pertanian semakin kompetitif.
8. Kurangnya jumlah SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya.

9. Pemasaran hasil pertanian masih terbatas pada toko-toko offline atau pemasaran langsung.
10. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi selama 3 tahun terakhir sebesar 1% per tahun juga dapat diartikan dengan makin bertambahnya penduduk Kota Bukittinggi kurang lebih 2.231 jiwa setiap tahunnya, jumlah ini setara dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi beras sebesar 19.048,40 ton per tahunnya, serta dampak dari meningkatnya wisatawan dan berkembangnya hotel dan restoran. Selain itu belum tersedianya Cadangan pangan Pemerintah (CPP) Kota Bukittinggi.
11. Adanya gejolak harga pangan dapat menunjukkan gejala terganggunya distribusi pangan yang mungkin disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan diperlukan suatu sistem deteksi dini serta kebijakan penanganan gejolak harga pangan yang cepat dan tepat. Untuk mendukung hal tersebut diperlukan data dan informasi yang cepat, tepat, akurat dan berkesinambungan melalui ketersediaan informasi harga, sehingga laju inflasi dapat ditekan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

LKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi ini pada dasarnya adalah pengkomunikasian pencapaian kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi selama tahun 2019. Penyusunan LKIP dimulai dengan menjelaskan Rencana Strategis (Renstra) yang terdiri atas visi, misi dan tujuan/sasaran, yang dijabarkan dalam bentuk program/kegiatan dan selanjutnya dilakukan sistem pengukuran kinerja antara realisasi sasaran/ program/kegiatan dengan rencananya, yaitu capaian kinerja (*performance result*) tahun 2018 diperbandingkan dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja tersebut akan menghasilkan keberhasilan berupa kesesuaian antara capaian kinerja dengan rencana kinerja. Atau pun menghasilkan ketidaksesuaian/kegagalan berupa sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang merupakan umpan balik untuk perbaikan atas kekurangan/kelemahan pada masa yang akan datang.

Dengan demikian penyajian LKIP Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

I.2. Gambaran Umum Organisasi

I.3. Isu Strategis SKPD

I.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis SKPD

II.2. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

IV.2. Strategi Peningkatan Kinerja

LAMPIRAN

Sebagai sebuah instansi sektor publik, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi mempunyai Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian tujuan dan sasaran tersebut akan diuraikan dalam bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun 2019 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja 2019.

### **II.1. Rencana Strategis SKPD**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu dan analisis strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Berdasarkan visi dan misi Walikota Bukittinggi Tahun 2016-2021 maka tujuan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, dan sasaran strategisnya antara lain:

Tujuan	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
Sasaran 1	Meningkatnya hasil pertanian dan Perikanan
Sasaran 2	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

**Tabel 1. Sasaran Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	1 Meningkatkan hasil pertanian dan perikanan	a. Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi	87.000	90.000	93.000	96.000	99.000	102.000
		2 Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH)	a. Persentase capaian Skor pola Pangan Harapan (PPH)	98,71	98,94	99,18	99,41	100	100

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan adalah kumpulan keputusan yang menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan tetap dilaksanakan, atau merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil dalam mencapai sasaran.

Arah kebijakan Strategi 1 adalah :

1. Pembenahan dan pelatihan untuk Gapoktan, Kelompok tani dan LKMA
2. Pengadaan dan pembinaan penggunaan alsin
3. Menerapkan dan mengadakan pelatihan, kursus, sosialisasi teknologi tepat guna.

Arah kebijakan Strategi 2 adalah :

1. Membuat kajian dan bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ditetapkan dalam suatu perda LP2B
2. Melakukan survey harga bahan pokok dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui radio dan videotron
3. Melakukan training mingguan dan diklat-diklat penyuluhan untuk peningkatan kompetensi penyuluh
4. Melakukan pengujian dan pengawasan makanan yang berasal dari produk pertanian yang beredar di masyarakat

Arah kebijakan Strategi 3 adalah :

- a. Memotivasi penggunaan bahan organik untuk peningkatan produksi pertanian



- b. Melaksanakan lomba dan promosi untuk menciptakan pangan olahan yang beragam, bergizi dan berimbang.

Arah kebijakan Strategi 4 adalah:

1. Menerapkan menu beragam, bergizi, seimbang dan pameran/promosi panganekaragaman olahan pangan
2. Penggunaan bibit unggul, pemupukan yang tepat waktu, tepat dosis serta pemberantasan hama dan OPT
3. Penggunaan mekanisasi dan peningkatan inovasi dan kreativitas pertanian.

## **II.2. Perjanjian Kinerja 2019**

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi Tahun 2019:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN/KINERJA	TARGET 2019
1	Meningkatkan Hasil Pertanian dan perikanan	1. Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi	99.000
2	Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	99,41 %

## ***AKUNTABILITAS KINERJA***

---

Akuntabilitas kinerja adalah sebagai salah satu media pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan atau kegagalan tersebut perlu dilakukan evaluasi kinerja dengan menganalisis akuntabilitas kinerja berupa pengukuran capaian kinerja dengan menetapkan indikator kinerja dan metodologi pengukurannya, dan analisis akuntabilitas keuangan.

### **A. *Capaian Kinerja Organisasi***

Pengukuran kinerja meliputi proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Pencapaian setiap indikator kinerja dilakukan dengan metodologi perbandingan capaian kinerja (*performance result*) dengan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Pencapaian setiap indikator tersebut pada tingkat pencapaian target dari kelompok indikator kinerja kegiatan dan sasaran yang telah dituangkan dalam rencana kinerja, berdasarkan sasaran dan program dalam Rencana Strategis. Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghitung persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran.

Tabel 3. Klasifikasi Penilaian Capaian Kinerja Kegiatan

NO	SKOR	NILAI	INTERPRETASI KARAKTERISTIK INSTANSI
1	> 85	AA	Memuaskan: Memimpin perubahan, 100 berbudaya kinerja, berkinerja tinggi, dan akuntabel, perlu terus berinovasi
2	>75 – 85	A	Sangat baik: Akuntabilitas kinerjanya baik,berkinerja baik, memiliki system manajemen kinerja yang handal, menggunakan knowledge management untuk membangun budaya berkinerja, perlu banyak inovasi
3	>65 – 75	B	Baik: akuntabilitas kinerjanya baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, perlu sedikit perbaikan untuk system dan perlu banyak berfokus perbaikan soft system
4	>50 – 65	CC	Cukup baik (memadai): Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki system yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja bagi pertanggungjawaban, tapi perlu banyak perbaikan, termasuk sedikit perbaikan yang mendasar
5	>30 – 50	C	Agak kurang: Memiliki system untuk manajemen kinerja tapi kurang dapat diandalkan, perlu banyak perbaikan dan termasuk perbaikan yang mendasar
6	0 – 30	D	Kurang: system dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar

Angka persentase capaian indikator kinerja didapatkan dengan menghasilkan persentase perbandingan realisasi capaian dengan rencana pada tingkat kegiatan dan selanjutnya pada tingkat sasaran. Evaluasi kinerja berupa analisis pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi.

Analisis pencapaian target untuk masing-masing indikator kinerja pada setiap sasaran adalah sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya hasil pertanian dan perikanan
-----------	--

Tabel 4. Target dan Capaian Kinerja Sasaran 1 meningkatnya hasil pertanian dan perikanan yaitu:

No	Indikator	Target	Capaian	%
1	Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi	96.000	99.709,80	103,86
2	Kontribusi hasil perikanan terhadap peningkatan ekonomi	5.300	5.279,1	103,51

Peningkatan hasil pertanian dan perikanan dihat dari komoditi sebagai berikut:

No	Komoditi	Target	Capaian	%
1	Produksi padi (ton)	5.501	5.610	101,98
2	Produksi ubi jalar (ton)	1.350	756	56
3	Produksi cabe (ton)	522	507,3	97,18
4	Produksi pisang (ton)	560	453,4	80,96
5	Produksi alpukat (ton)	240	243,2	101,3
6	Produksi daging ternak besar (kg)	1.223.219	1.558.565	127,41
7	Produksi daging kambing (kg)	3.299	4.230	128,22
8	Produksi susu (liter)	6.151	1.386	22,53
9	Produksi telur (butir)	18.213	17.934	98,47
10	Produksi ikan (ton)	475	415	87,36

Capaian produksi padi, alpukat, produksi daging ternak besar, produksi daging kambing, telah melampaui target yang ditetapkan dan mengalami peningkatan dari pada tahun sebelumnya. Sedangkan Produksi ubi jalar, cabe, pisang, susu, telur dan produksi ikan masih dibawah target yang ditetapkan tetapi telur dan produksi ikan terjadi peningkatan dari tahun 2018 dan terjadi penurunan dari pada tahun 2018 pada produksi ubi jalar, abe, pisang dan susu.

Usaha yang dilakukan untuk pencapaian sasaran pada sektor pertanian tersebut antara lain dengan meningkatkan penggunaan teknologi budidaya padi seperti penambahan luas tanam jajar legowo (jarwo), meningkatnya prasarana pertanian yang fungsional, peningkatan penggunaan pupuk dan alsintan yang tepat sasaran. Untuk meningkatkan produksi ubi jalar maka ditingkatkan penggunaan bibit unggul tanaman ubi jalar. Upaya peningkatan produksi cabe dilakukan dengan penambahan luas lahan tanam cabe dan pemberian bantuan bibit cabe. Namun berbagai kendala belum dapat teratasi dengan baik yaitu

adanya serangan organisme pengganggu tanaman, faktor cuaca yang berdampak pada rendahnya produksi pertanian.

Upaya peningkatan produksi pertanian ini didukung oleh program:

1. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan dengan Penangkaran Jabal Benih Padi, Pemanfaatan Lahan Perkarangan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), Pengawasan Pupuk dan Pestisida, Penunjang kegiatan UPSUS Pajale, Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi, Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian, Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian, Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian, Pengadaan bibit buah-buahan, Pengadaan bibit buah-buahan, Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah, dan Sosialisasi Rencana LP2B.
2. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan , dengan kegiatan Penyusunan dan pengendalian program dan rencana kerja penyuluh pertanian (RKPP), Pelaksanaan training dan review kegiatan, Penunjang Operasional BPP Model, Pekan Daerah (PEDA)

Capaian untuk peningkatan produksi peternakan dilakukan melalui peningkatan populasi ternak dan kualitas produk peternakan. Antara lain dengan meningkatkan persentase kebuntingan dan persentase kelahiran ternak. Capaian pada tahun 2019 adalah 31% kebuntingan dan 21,64% kelahiran ternak. Selain itu dilakukan peningkatan kesehatan hewan dengan memberi pelayanan kesehatan hewan melalui UPTD puskesmas, berupa pemeriksaan hewan besar, pemeriksaan hewan qurban, vaksinasi rabies dan sterilisasi Hewan Penular Rabies (HPR).

Peningkatan produksi ternak didukung oleh:

1. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak dengan kegiatan Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, dan Penunjang Operasional Puskesmas,

Target Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2019 untuk produksi Ikan sebesar 475 Ton, sesuai dengan target dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian produksi ikan Kota Bukittinggi tahun 2019 adalah 415 ton atau 87,37%. Hal ini disebabkan karena luas lahan di Kota Bukittinggi sangat terbatas.

Untuk mencapai target produksi ikan didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pengembangan budidaya perikanan dengan kegiatan Penunjang Operasional BBIH, Peningkatan produksi ikan air tawar, Pengembangan budidaya lele, dan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Sisa DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2010-2015)
2. Program Pengembangan pengolahan & pemasaran hasil perikanan dengan kegiatan Promosi dan Lomba Gemarikan, dan Peningkatan mutu hasil perikanan

Indikator output pada sasaran 1 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Luas lahan pertanian yang ditanami benih berlabel	Ha	0,2 Ha	1	100
2	jumlah festival hortikultura tk. Kota Bukittinggi dan Nasional yang diikuti	Kali	2 kali	30	100
3	Jumlah bibit tanaman yang dihasilkan	Jenis	25 jenis	1	100
4	Jumlah pengendalian hama dan tikus	Kali	2	12	100
5	Laporan pengawasan pestisida dan Pupuk di Kota Bukittinggi	Lapran	12	17	113
6	Laporan pelaksanaan kegiatan UPSUS tanaman pertanian	Lapran	12	15	150
7	jumlah tanaman buah-buahan untuk penghijauan Kota Bukittinggi	Paket	1	2	100
8	alat potong rumput terbeli; handsprayer terbeli; bentor terbeli; gerobak terbeli; cultivator terbeli; tresher mini terbeli; traktor 8,5 PK terbeli; corn seller terbeli; RMU terbeli; power sprayer terbeli	Unit	10 unit; 9 unit; 2 unit; 6 unit; 3 unit; 3 unit; 2 unit; 1 unit; 1 unit; 1 unit	12	100
9	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang fungsional dibangun	paket	6	4; 5; 4; 3	100
10	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diperbaiki	paket	2	100	100
11	jumlah bibit buah-buahan yang disalurkan	batang	11680	2	100
12	Terlaksananya kursus teknologi bawang merah; terlaksananya demplot/lahan percontohan bawang merah	paket	1 kali; 2 paket	2	100
13	Terlaksananya Sosialisasi LP2B	kelurahan	7	2	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
14	Terlaksananya penyusunan dokumen program kecamatan, kota dan RKTP	dokumen	1	300	100
15	Jumlah training dan review penyuluh pertanian lapangan terlaksana; Jumlah temu teknis petani dan KTNA terlaksana	Kali	2,24	2375	100
16	Tersediannya anggaran untuk sarana dan prasarana operasional BPP	Bulan	12	750	100
17	Jumlah Poktan yang didampingi dan dibina penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Kali	1	50	100
18	Terlaksananya penyusunan dokumen program kecamatan, kota dan RKTP	dokumen	1	12	100
19	penangkapan anjing; Jumlah peserta sosialisasi tentang zoonosis	Orang	50	50	100
20	Pelayanan kesehatan hewan di UPTD Puskesmas; Vaksinasi rabies; Pemeriksaan kesehatan Hewan besar di Kota Bukittinggi; Sterilisasi HPR di Kota Bukittinggi; Pemeriksaan Hewan Qurban di Kota Bukittinggi	Ekor	2750; 1100; 285 ; 40; 850	1	100
21	jumlah produksi benih ikan	Ekor	389000	2	100
22	pengadaan benih; pengadaan pakan ikan; peningkatan SDM	ekor;kg; orang	130000 ; 5000 ; 50	0	0
23	Pembangunan/rehap kolam, pengadaan induk, benih ikan, pakan ikan, peningkatan SDM kelompok	Paket	1	5;2;3	100
24	jumlah kolam terpelihara	paket	1	44;43;55	100
25	pelaksanaan promosi gemarikan; lomba yang diikuti	kali; jenis	1,4	1	100
26	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pengolahan ikan	paket	1	12	100
27	Jumlah peserta sosialisasi penyakit zoonosis	Orang	50	38	76
28	Jumlah penangkapan anjing liar	Kali	1	2	200
29	Sterilisasi HPR; Pemeriksaan kesehatan hewan besar; Pelayanan kesehatan hewan; Pemeriksaan hewan qurban; Jumlah vaksinasi rabies;	Ekor	40; 285; 2750; 848; 1100	48; 311; 2981; 1040; 1100	120
30	Jumlah peserta pelatihan pemotongan hewan qurban	Orang	75	33	44
31	Jumlah cabang lomba yang diikuti	lomba	2	2	100
32	Jumlah database peternakan yang tersusun	dokumen	1	1	100
33	Jumlah kuda bibit pejantan yang terpelihara	Ekor	1	1	100
34	Jumlah pemotongan sapi dan kerbau	Ekor	6.150	5.882	95,6
35	Pengadaan Tanah Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi	M2	131	0	0
36	Lomba jingle; lomba masak ikan; lomba forikan; jumlah promosi; Lomba paud	Kali	2;2;1;2;1	2;2;1;2;1	100

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
37	Jumlah produksi benih ikan	Ekor	347.900	367.440	105

Sasaran 2	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
-----------	--

Target Dinas Pertanian dan Pangan untuk mencapai sasaran 2 adalah Persentase capaian Skor Pola Pangan Harapan sebesar 99,41%. Skor PPH pada tahun 2019 yakni 83,1. Persentase capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah perbandingan antara skor PPH pada tahun tersebut dengan target akhir RPJMD (85,2%), untuk tahun 2019 persentase capaian skor PPH yaitu 97,54%, dibawah target yang ditetapkan. Hasil perhitungan dan analisa skor PPH tersebut menunjukkan bahwa konsumsi buah di Kota Bukittinggi masih rendah.

Pencapaian Skor PPH ini didukung oleh Angka konsumsi energi dan protein perkapita mencapai 2.595 Kkal/kap/hr dan 71,56 gr/kap/hr, diharapkan terjadi penurunan konsumsi beras, namun pada tahun 2019 terjadi kenaikan sebesar 1%. Terjaminnya keamanan pangan yang ditunjukkan dengan penurunan bahan pangan terkontaminasi diatas ambang batas yaitu sebesar 20,8%.

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan berasal dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Pangan pada tahun 2019 antara lain:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan, dengan kegiatan: Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Bukittinggi, Pemantauan dan Informasi Harga Pangan, Penyusunan Neraca Bahan Makanan, Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi, Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan, Bazar Bahan Pangan.
2. Program Peningkatan Diversifikasi Pangan, dengan kegiatan: Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat, Pemanfaatan Lahan Pekarangan, Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Penunjang event-event daerah Indikator output pada sasaran 2 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Jumlah rekomendasi yang dihasilkan	rekomendasi	2	2	100



No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
2	Jumlah laporan; Jasa Informasi media elektronik	laporan	12	12	100
3	Jumlah dokumen neraca bahan makanan yang tersusun	Dokumen	1	60	100
4	Dokumen SKPG	Dokumen	1	1	100
5	Jenis komoditi yang di uji	jenis	14	1	100
6	jumlah komoditi bazaar	jenis	10	1	100
7	Buku informasi pola konsumsi masyarakat	dokumen	1	15	100
8	Jumlah kelurahan yang menerima bantuan bibit dan benih	kelurahan	6	1	100
9	jumlah pameran yang diikuti; jumlah lomba yang diikuti	kali; kali	2	10	100
10	jumlah event yang diikuti	kali	5	220	100

Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa semua kegiatan pada tahun 2019 telah terlaksana dengan baik, semua indikator kinerja dan target yang ditetapkan dapat direalisasikan 100%.

## **B. Realisasi Anggaran**

Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2019 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 16.563.142.598,39 yang terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 7.444.017.493,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 9.119.125.105,39 Sedangkan target pendapatan Pertanian dan Pangan adalah sebesar Rp. 286.600.000,- .

Rincian aspek keuangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7. Rincian Aspek Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan

No	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	<b>Pendapatan</b>	<b>286.600.000</b>	<b>318.482.925</b>	<b>111,12</b>
2	<b>Belanja</b>	<b>16.563.142.598,39</b>	<b>15.458.472.793,51</b>	<b>93,33</b>
	- Tidak Langsung	7.444.017.493,00	7.206.093.640,00	96,8

- Langsung	9.119.125.105,39	8.252.379.153,51	90,5
------------	------------------	------------------	------

Anggaran yang tersedia untuk mendukung secara langsung dalam pencapaian kegiatan/program/sasaran strategis akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi tahun 2019 dengan rincian anggaran dan realisasi per kegiatan adalah sebagai berikut :

**Tabel 8. Realisasi Anggaran Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019**

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
<b>A</b>	<b>Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan</b>	100.841.000,00	90.113.464,00	89,36%	10.727.536,00
1	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	12.000.000,00	10.041.050,00	83,68%	1.958.950,00
2	Pemantauan Informasi Harga Pangan	30.000.000,00	25.971.414,00	86,57%	4.028.586,00
3	Penyusun Neraca Bahan Makanan	10.000.000,00	9.627.000,00	96,27%	373.000,00
4	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9.000.000,00	8.575.250,00	95,28%	424.750,00
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	30.000.000,00	26.412.250,00	88,04%	3.587.750,00
6	Bazar Bahan Pangan	9.841.000,00	9.486.500,00	96,40%	354.500,00
<b>B</b>	<b>Program Peningkatan Diversifikasi Pangan</b>	274.437.250,00	258.562.087,00	94,35%	15.875.163,00
1	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	5.000.000,00	3.787.900,00	75,76%	1.212.100,00
2	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	119.437.250,00	107.411.950,00	89,93%	12.025.300,00
3	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	125.000.000,00	122.583.737,00	98,07%	2.416.263,00
4	Penunjang event-event daerah	5.000.000,00	3.787.900,00	75,76%	1.212.100,00
<b>C</b>	<b>Program Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan</b>	164.425.000,00	157.040.980,00	95,51%	7.384.020,00
1	Promosi dan Sosialisasi Gemarikan	124.425.000,00	118.550.980,00	95,28%	5.874.020,00
2	Peningkatan mutu hasil perikanan	40.000.000,00	38.490.000,00	96,23%	1.510.000,00
<b>D</b>	<b>Program Pengembangan Perikanan budidaya</b>	917.497.000,00	871.813.492,00	95,02%	45.683.508,00
1	Penunjang Operasional BBIH	226.832.760,00	211.691.172,00	93,3%	15.141.588,00
2	Peningkatan Produksi Ikan Air Tawar	53.674.270,00	53.347.394,00	99,4%	326.876,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
<b>E</b>	<b>Peningkatan Kualitas SDM Pembudidaya Ikan</b>	917.497.000,00	871.813.492,00	95,02%	45.683.508,00
1	Penunjang Operasional BBIH	188.147.000,00	180.041.122,00	95,69%	8.105.878,00
	Peningkatan produksi ikan air tawar	260.000.000,00	253.229.350,00	97,40%	6.770.650,00
	Pengembangan budidaya lele	150.000.000,00	148.536.360,00	99,02%	1.463.640,00
	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Sisa DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2010-2015)	319.350.000,00	290.006.660,00	90,81%	29.343.340,00
<b>F</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1.134.327.392,00	1.058.480.142,00	93,31%	75.847.250,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.012.000,00	4.996.000,00	99,68%	16.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36.100.000,00	29.553.797,00	81,87%	6.546.203,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	222.499.638,00	173.750.349,00	78,09%	48.749.289,00
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	136.309.300,00	134.230.296,00	98,47%	2.079.004,00
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15.000.000,00	14.841.400,00	98,94%	158.600,00
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	0,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3.156.600,00	3.145.680,00	99,65%	10.920,00
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	13.400.000,00	13.357.800,00	99,69%	42.200,00
9	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	260.000.000,00	256.386.540,00	98,61%	3.613.460,00
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.585.500,00	6.585.000,00	99,99%	500,00
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	298.469.280,00	297.269.280,00	99,60%	1.200.000,00
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	55.719.875,00	44.146.300,00	79,2%	11.573.575,00
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	454.100.000,00	330.640.019,00	72,81%	123.459.981,00
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	52.000.000,00	51.964.800,00	99,93%	35.200,00
2	Pengadaan Tanah Relokasi RPH Kota Bukittinggi	402.100.000,00	278.675.219,00	69,30%	123.424.781,00
<b>I</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	123.448.799,00	118.261.983,00	95,80%	5.186.816,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
1	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	91.926.299,00	87.803.263,00	95,51%	4.123.036,00
2	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	31.522.500,00	30.458.720,00	96,63%	1.063.780,00
<b>K</b>	<b>Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan</b>	50.245.604,00	47.480.420,00	94,50%	2.765.184,00
1	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	50.245.604,00	47.480.420,00	94,50%	2.765.184,00
<b>L</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan</b>	3.466.144.880,00	3.165.930.170,39	91,34%	300.214.709,61
1	Penangkaran Jabal Benih Padi	33.455.500,00	30.628.450,00	91,55%	2.827.050,00
2	Pengembangan tanaman Hortikultura	60.000.000,00	55.181.750,00	91,97%	4.818.250,00
3	Pembibitan tanaman hortikultura	30.000.000,00	27.305.600,00	91,02%	2.694.400,00
4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)	14.750.000,00	13.456.860,00	91,23%	1.293.140,00
5	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	35.000.000,00	34.699.402,00	99,14%	300.598,00
6	Penunjang kegiatan UPSUS Pajale	25.000.000,00	22.636.650,00	90,55%	2.363.350,00
7	Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	474.075.200,00	408.042.700,00	86,07%	66.032.500,00
8	Pemberian bantuan alat dan mesin pertanian	308.550.000,00	274.858.858,00	89,08%	33.691.142,00
9	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	1.345.587.380,39	1.340.445.600,39	99,62%	5.141.780,00
10	Pemeliharaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	313.500.000,00	312.315.000,00	99,62%	1.185.000,00
11	Pengadaan bibit buah-buahan	729.500.000,00	564.083.450,00	77,32%	165.416.550,00
12	Kursus dan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	49.726.800,00	48.732.450,00	98,00%	994.350,00
13	Sosialisasi Rencana LP2B	47.000.000,00	33.543.400,00	71,37%	13.456.600,00
<b>M</b>	<b>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan</b>	201.000.145,00	177.008.755,00	88,06%	23.991.390,00
1	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja Penyuluh Pertanian (RKPP)	16.943.300,00	15.267.550,00	90,11%	1.675.750,00
2	Pelaksanaan training dan review kegiatan	49.156.845,00	44.826.210,00	91,19%	4.330.635,00
3	Penunjang Operasional BPP Model	60.400.000,00	55.521.395,00	91,92%	4.878.605,00
	Pekan Daerah (PEDA)	74.500.000,00	61.393.600,00	82,41%	13.106.400,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE	SISA ANGGARAN
<b>N</b>	<b>Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak</b>	196.538.250,00	185.432.082,00	94,35%	11.106.168,00
1	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Zoonosis	33.999.950,00	29.473.550,00	86,69%	4.526.400,00
2	Penunjang Operasional Poskeswan	162.538.300,00	155.958.532,00	95,95%	6.579.768,00
<b>O</b>	<b>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</b>	106.003.000,00	102.470.850,00	96,67%	3.532.150,00
1	Operasional Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	91.003.000,00	89.036.350,00	97,84%	1.966.650,00
2	UPSUS SIWAB	15.000.000,00	13.434.500,00	89,56%	1.565.500,00
<b>P</b>	<b>Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan</b>	1.864.988.215,00	1.636.555.619,12	87,75%	228.432.595,88
1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	58.956.200,00	58.789.200,00	99,72%	167.000,00
2	Penunjang Operasional RPH	199.830.015,00	169.596.327,00	84,87%	30.233.688,00
3	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	431.836.000,00	395.384.000,00	91,56%	36.452.000,00
	Relokasi Rumah potong Hewan Kota Bukittinggi (DAK fisik tahun 2019 bidang Pertanian	1.174.366.000,00	1.012.786.092,12	86,24%	161.579.907,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.563.142.598,39</b>	<b>15.458.472.793,51</b>	<b>93,33</b>	<b>1.104.669.804,88</b>

Selain Anggaran yang tersedia dalam APBD Pemerintah Kota Bukittinggi terdapat anggaran dengan sumber lainnya yang sah yaitu APBN/ Tugas Perbantuan. Adapun anggaran APBN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi adalah sebesar Rp. 504.560.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 463.885.650,- atau 91,94% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Aspek Keuangan Dinas Pertanian dan Pangan bersumber APBN

No	URAIAN	ANGGARAN		
		JUMLAH	REALISASI	(%)
		(Rp)	(Rp)	
1	Tugas Pembantuan yang dikoordinir Satuan Kerja (Satker) Dinas Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat	245.650.000	219.095.050	89,19

2	Tugas Pembantuan yang dikoordinir Satuan Kerja (Satker) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	258.910.000	244.790.000	96,41
	TOTAL	504.560.000	463.885.050	91,94

Anggaran tersebut dikoordinir oleh Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumbar dan Dinas Pangan Provinsi sumbar yang dikerjakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi.

---

***IV. 1. Kesimpulan***

1. Tujuan Dinas Pertanian dan Pangan adalah Meningkatnya pertumbuhan dan pemeratan ekonomi
2. Sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan adalah seperti berikut :
  - Sasaran 1 Meningkatnya hasil pertanian dan perikanan  
Dengan capaian indikator Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi sebesar 99.709,80
  - Sasaran 2 Tercapainya Skor Pola Pangan harapan (PPH)  
Dengan Indikator Persentase capaian Skor (PPH) yaitu perbandingan antara skor PPH pada tahun tersebut dengan target akhir RPJMD (85,2%), untuk tahun 2019 persentase capaian skor PPH yaitu 97,54%

***IV. 2. Strategi Peningkatan Kinerja***

Berikut beberapa strategi peningkatan kinerja:

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2019.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Bukittinggi, Februari 2020

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN  
KOTA BUKITTINGGI**



NIP.19620724.198302 1 001



## DATA DUKUNG LKIP KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2019

SKPD: Dinas Pertanian dan Pangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Target
1	Meningkatkan Hasil Pertanian dan Perikanan	1. Kontribusi hasil pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap peningkatan ekonomi	Nilai kontribusi hasil pertanian terhadap peningkatan ekonomi	99.000
2	Tercapainya Pola Pangan Harapan (PPH)	Persentase capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH dibagi Target PPH akhir RPJMD dikalikan 100%	99,41

1. Kegiatan atau pembangunan yang dibiayai melalui dana CSR 2019

No	SKPD	Perusahaan pemberi dana	Nilai	Deskripsi kegiatan	Lokasi
1.	Dinas Pertanian dan Pangan	Bank Indonesia	Rp. 40.000.000	Pemanfaatan Lahan Pekarangan Dengan Menanam Tanaman Cabe untuk Menurunkan Inflasi	a. KWT Pepaya di Kel. Kubu Tanjung b. KWT Mekar di Kel. Campago Guguk Bulek c. KWT Nabati di Kel. Garegeh d. DW Dahlia I di Kel. Campago Guguk Bulek

2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan capaian indikator?

Berikut beberapa upaya untuk peningkatan capaian indikator :

1. Kegiatan yang realisasi capaian kinerja masih rendah untuk dapat dianggarkan kembali dalam Renja tahun 2020.
2. Untuk meningkatkan kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Bukittinggi maka perlu dilakukan antisipasi lebih awal untuk kegiatan-kegiatan yang banyak melibatkan pihak-pihak lain yaitu dengan memperbanyak koordinasi.
3. Melakukan persiapan awal kegiatan dengan lebih baik dan matang.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan baik yang diadakan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga setiap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang ada mengerti dan paham dengan sasaran yang hendak dicapai dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

3. Program atau kegiatan penunjang pencapaian indikator?

No	Program/Kegiatan	Anggaran Tahun 2019	Realisasi Anggaran 2019	Persentase
1	2	5	6	7
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,134,327,392.00	1,058,480,142.00	93.31%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,012,000.00	4,996,000.00	99.68%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	36,100,000.00	29,553,797.00	81.87%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	222,499,638.00	173,750,349.00	78.09%
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	136,309,300.00	134,230,296.00	98.47%
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	15,000,000.00	14,841,400.00	98.94%
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	3,156,600.00	3,145,680.00	99.65%
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	13,400,000.00	13,357,800.00	99.69%
9	Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi, Sosialisasi dan Perjalanan Dinas Lainnya ke Luar Kota Bukittinggi	260,000,000.00	256,386,540.00	98.61%
10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6,585,500.00	6,585,000.00	99.99%
11	Penyediaan Jasa Pegawai Non PNS	298,469,280.00	297,269,280.00	99.60%
12	Pelaksanaan Proses Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	122,795,074.00	109,364,000.00	89.06%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	454,100,000.00	330,640,019.00	72.81%
1	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	52,000,000.00	51,964,800.00	99.93%
2	Pengadaan Tanah Relokasi RPH Kota Bukittinggi	402,100,000.00	278,675,219.00	69.30%
III	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	123,448,799.00	118,261,983.00	95.80%
1	Penyediaan Penunjang Pengelolaan dan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	91,926,299.00	87,803,263.00	95.51%
2	Penyusunan Data Statistik dan Informasi Pertanian	31,522,500.00	30,458,720.00	96.63%
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	100,841,000.00	90,113,464.00	89.36%
1	Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	12,000,000.00	10,041,050.00	83.68%
2	Pemantauan Informasi Harga Pangan	30,000,000.00	25,971,414.00	86.57%
3	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	10,000,000.00	9,627,000.00	96.27%
4	Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi	9,000,000.00	8,575,250.00	95.28%
5	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	30,000,000.00	26,412,250.00	88.04%
6	Bazar Bahan Pangan	9,841,000.00	9,486,500.00	96.40%
V	Program Peningkatan Diversifikasi Pangan	274,437,250.00	258,562,087.00	94.22%
1	Penyusunan Buku Informasi Pola Konsumsi Masyarakat	5,000,000.00	3,787,900.00	75.76%
2	Pemanfaatan Lahan Perkarangan	119,437,250.00	107,411,950.00	89.93%
3	Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	125,000,000.00	122,583,737.00	98.07%
4	Penunjang event-event daerah	25,000,000.00	24,778,500.00	99.11%
VI	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	50,245,604.00	47,480,420.00	94.50%
1	Bimbingan dan Pelatihan Kelompok Usaha (UP3HP)	50,245,604.00	47,480,420.00	94.50%
VII	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	3,466,144,880.00	3,165,930,170.39	91.34%

1	PenangkaranJabal Benih Padi	33,455,500.00	30,628,450.00	91.55%
2	Pengembangan tanaman Hortikultura	60,000,000.00	55,181,750.00	91.97%
3	Pembibitan tanaman hortikultura	30,000,000.00	27,305,600.00	91.02%
4	Pengendalian OrganismePenggangguTanaman (OPT)	14,750,000.00	13,456,860.00	91.23%
5	Pengawasan Pupuk dan Pestisida	35,000,000.00	34,699,402.00	99.14%
6	Penunjang kegiatan UPSUS Pajale	25,000,000.00	22,636,650.00	90.55%
7	Pengadaan Pohon untuk penghijauan Kota Bukittinggi	474,075,200.00	408,042,700.00	86.07%
8	Pemberian bantuan alat danmesin pertanian	308,550,000.00	274,858,858.00	89.08%
9	Penyediaan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pertanian	1,345,587,380.39	1,340,445,600.39	99.62%
10	Pemeliharaan Infrastruktur Saranadan Prasarana Pertanian	313,500,000.00	312,315,000.00	99.62%
11	Pengadaan bibit buah-buahan	729,500,000.00	564,083,450.00	77.32%
12	Kursusdan Demplot Teknologi Budidaya Bawang Merah	49,726,800.00	48,732,450.00	98.00%
13	Sosialisasi Rencana LP2B	47,000,000.00	33,543,400.00	71.37%
VIII	Program PeningkatanKesejahteraanPetani	65,128,570.00	52,589,090.00	80.75%
1	Pembinaan dan penilaian Kelompok pada Dinas Pertanian dan Pangan	65,128,570.00	52,589,090.00	80.75%
IX	Program PemberdayaanPenyuluhPertanian/Perkebunan	201,000,145.00	177,008,755.00	88.06%
1	Penyusunan dan Pengendalian Program dan Rencana Kerja PenyuluhPertanian (RKPP)	16,943,300.00	15,267,550.00	90.11%
2	Pelaksanaan training dan review kegiatan	49,156,845.00	44,826,210.00	91.19%
3	Penunjang Operasional BPP Model	60,400,000.00	55,521,395.00	91.92%
4	Pekan Daerah (PEDA)	74,500,000.00	61,393,600.00	82.41%
X	Program Pencegahan Dan PenanggulanganPenyakitTernak	196,538,250.00	185,432,082.00	94.35%
1	Pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis	33,999,950.00	29,473,550.00	86.69%
2	Penunjang Operasional Puskesmas	162,538,300.00	155,958,532.00	95.95%
XI	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	106,003,000.00	102,470,850.00	96.67%
1	Operasional Pengelolaan Kuda Bibit Pejantan	91,003,000.00	89,036,350.00	97.84%
2	UPSUS SIWAB	15,000,000.00	13,434,500.00	89.56%
XII	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	1,864,988,215.00	1,636,555,619.12	87.75%
1	Promosi Atas Hasil Produksi Peternakan Unggulan Daerah	58,956,200.00	58,789,200.00	99.72%
2	Penunjang Operasional RPH	199,830,015.00	169,596,327.00	84.87%
3	Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan RPH	431,836,000.00	395,384,000.00	91.56%
4	Relokasi Rumah Potong Hewan Kota Bukittinggi (DAK fisiktahun 2019 bidang Pertanian).	1,174,366,000.00	1,012,786,092.12	86.24%
XII	Program Pengembangan Pengolahandan Pemasaran Hasil Perikanan	164,425,000.00	157,040,980.00	95.51%
1	Promosidan Sosialisasi Gemarikan	124,425,000.00	118,550,980.00	95.28%
2	Peningkatan mutu hasil perikanan	40,000,000.00	38,490,000.00	96.23%
XIII	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	917,497,000.00	871,813,492.00	95.02%
1	Penunjang Operasional BBIH	188,147,000.00	180,041,122.00	95.69%
2	Peningkatan produksi ikan air tawar	260,000,000.00	253,229,350.00	97.40%
3	Pengembangan budidaya lele	150,000,000.00	148,536,360.00	99.02%

4	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Sisa DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2010-2015)	319,350,000.00	290,006,660.00	90.81%
---	--	----------------	----------------	--------

Bukittinggi, Februari 2020  
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan  
Kota Bukittinggi



**ISMAIL, SH, MM**  
NIP. 196207241983021001